***Solid Waste Capacity Index for Local Governments* (SCIL)**

**Dokumen Persiapan Survey SCIL**

**Komponen 6 – Pelibatan Masyarakat**

Survei SCIL adalah salah satu komponen dari Alat Indeks Kapasitas Pengelolaan Sampah untuk Pemerintah Lokal (*Solid waste Capacity Index for Local government*) dalam program Kota Bersih, Lautan Biru (Clean Cities, Blue Ocean) yang didukung oleh USAID. Survei SCIL ini terdiri dari enam komponen.

Dokumen ini menyediakan gambaran umum dari semua pertanyaan Komponen 6: Pelibatan Masyarakat yang terkandung dalam survei SCIL. Ini memungkinkan para peserta penilaian untuk meninjau setiap pertanyaan "Ya/Tidak" ini untuk menentukan mana yang dapat dijawab dengan "Ya" dan mulai mengumpulkan "bukti" untuk mendukung jawaban tersebut. Kolom terakhir dapat digunakan untuk melacak apakah bukti telah ditemukan. Jawaban dan bukti harus dimasukkan ke dalam Pelacak SCIL untuk membentuk Skor SCIL.

| **Kriteria** | **Pertanyaan #** | **Penilaian SCIL CCBO** **Pertanyaan Kriteria Penyampaian Layanan**  | **Tanggapan Awal –** Tandai jika Anda berpikir jawaban untuk pertanyaan ini adalah "Ya" | **Dokumentasi –** Berikan nama dan/atau URL dari dokumentasi untuk menunjukkan bahwa jawaban adalah "Ya" |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penjangkauan dan pelibatan masyarakat mengenai sistem pengelolaan sampah dilakukan secara inklusif dan teratur. | 1 | Apakah pemerintah daerah telah melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk meningkatkan implementasi sistem pengelolaan sampah **tidak terpilah/residu** (misalnya, kelompok penggiat lingkungan, pemuda, organisasi perempuan, pelaku bisnis, penggiat daur ulang, dan kelompok agama, dll.)? | Y: \_\_\_ N: \_\_\_  |  |
| 2 | Apakah pemerintah daerah telah melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk meningkatkan implementasi **program 3R** (misalnya, kelompok penggiat lingkungan, pemuda, organisasi perempuan, pelaku bisnis, pelaku daur ulang, dan kelompok agama, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 3 | Apakah pemerintah daerah telah melibatkan berbagai kelompok pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada proses perencanaan penganggaran dan pembiayaan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 4 | Apakah perspektif perempuan ditemukenali dan diberi bobot yang signifikan dalam perencanaan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 5 | Apakah pemerintah daerah menggunakan media sosial (misalnya, Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, dll.) untuk menjangkau pemangku kepentingan dengan pesan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 6 | Apakah pertemuan publik terkait pengelolaan sampah disosialisasikan secara luas oleh pemerintah daerah dan diadakan pada waktu/tempat yang sesuai agar menarik kehadiran dan keragaman yang lebih besar? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Kelompok pemangku kepentingan pengelolaan sampah setempat terbentuk | 7 | Apakah representasi komite pengarah pengelolaan sampah (forum kerjasama) pemerintah daerah mencerminkan demografi populasi yurisdiksinya (ekonomi, gender, ras, budaya, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 8 | Apakah rapat komite pengarah pengelolaan sampah pemerintah (forum kerjasama) daerah bersifat publik dan dijadwalkan secara reguler? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Kinerja dan kemajuan pengelolaan sampah dilaporkan ke publik | 9 | Apakah pemerintah daerah mendistribusikan informasi kepada publik tentang kinerja dan kemajuan sistem pengelolaan sampah, setidaknya tahunan? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Penilaian dampak lingkungan dan sosial dilakukan sebelum membangun fasilitas pengelolaan sampah baru | 10 | Apakah pemerintah daerah mensurvei opini warga yang tinggal di lingkungan sekitar fasilitas pengelolaan sampah dan pertemuan publik yang diusulkan? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 11 | Apakah umpan balik pemangku kepentingan daerah menjadi sumber informasi untuk pemilihan lokasi, dan desain fasilitas pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Warga/pelanggan dapat menyampaikan keluhan terkait pengelolaan sampah melalui sistem pelaporan | 12 | Apakah pemerintah daerah menerima keluhan pengguna layanan pengelolaan sampah melalui lebih dari satu cara (misalnya, hotline, media sosial, tatap muka, atau kotak pengaduan fisik)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 13 | Apakah pemerintah daerah memiliki sistem untuk mencatat penerimaan, waktu, dan penyelesaian keluhan warga tentang kualitas layanan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Persepsi dan kepuasan warga terhadap layanan pengelolaan sampah didapatkan dan diukur | 14 | Apakah pemerintah daerah melakukan survei periodik dari sampel representatif **warga** tentang persepsi dan kepuasan mereka dengan layanan pengelolaan sampah (baik online, kuesioner, secara manual, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 15 | Apakah pemerintah daerah melakukan survei periodik dengan sampel representatif **non-rumah tangga** (misalnya, pemilik bisnis, institusi, dll.) tentang persepsi dan kepuasan mereka dengan layanan pengelolaan sampah (baik online, kuesioner, secara manual, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| 16 | Apakah mayoritas wargal puas dengan layanan pengelolaan sampah daerah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 17 | Apakah pemerintah daerah telah membuat upaya khusus untuk meminta opini, dan menyediakan informasi kepada pengumpul sampah informal? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |   |
| Jadwal pengumpulan, lokasi pembuangan, fasilitas pendauran-ulang, dan aturan pemilahan sampah dipublikasikan dan disebarluaskan. | 18 | Apakah pemerintah daerah menyediakan informasi secara meluas tentang cara berpartisipasi dengan benar dalam layanan pengelolaan sampah (misalnya, frekuensi pengumpulan sampah, jadwal, lokasi *drop-off*, dll.)?  | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 19 | Apakah pemerintah daerah telah meyusun program komunikasinya (Perubahan Sosial Perilaku/Komunikasi Pendidikan Informasi) untuk pengelolaan sampah berdasarkan riset programatik SBC dengan orang-orang yang akan dijangkau? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 20 | Apakah pemerintah daerah memiliki layanan untuk memberikan dukungan berkelanjutan bagi warga untuk melakukan perilaku yang diinginkan terkait dengan pengelolaan sampah (misalnya, hotline, pengingat teks, pemimpin komunitas, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 21 | Apakah pemerintah daerah meluncurkan kampanye informasi publik pengelolaan sampah untuk menginstruksikan warga tentang cara memisahkan dan mempersiapkan pewadahan semua jenis sampah dalam program pengumpulan pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| Berbagai saluran penjangkauan digunakan untuk menginformasikan masyarakat terkait pengelolaan sampah | 22 | Apakah upaya perubahan perilaku dan pendidikan lingkungan untuk sistem pengelolaan sampah menargetkan kelompok yang berdampak tinggi (misalnya, perempuan dan pemuda)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 23 | Apakah pemerintah daerah menggunakan beberapa saluran untuk menyebarluaskan informasi pengelolaan sampah kepada publik (misalnya, media sosial, situs web, media cetak, papan reklame, radio dan TV, forum/publik acara, penggiat lingkungan/kader, dan penjangkauan dari pintu ke pintu, dll.)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| Regulasi pengelolaan sampah terbaru disertai rencana komunikasi perubahan prilaku disusun/diluncurkan | 24 | Apakah pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan penjangkauan publik untuk menginformasikan perubahan dan konsekuensi dari regulasi/kebijakan pengelolaan sampah yang baru diterbitkan dan akan dijalankan? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 25 | Apakah setiap strategi informasi publik pengelolaan sampah lokal telah mengidentifikasi audiens kunci, pesan, dan metode untuk menjangkau orang (saluran)? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| Pelaku pelanggaran pengelolaan sampah diedukasi ulang untuk perbaikan prilaku | 26 | Apakah pemerintah daerah memadukan penegakan hukum pengelolaan sampah lokal dengan pesan positif dan pendidikan tentang mengikuti hukum pengelolaan sampah? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| 27 | Apakah strategi komunikasi pengelolaan sampah pemerintah daerah didukung dengan tindakan penegakan? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |
| Data pemantauan dan penegakan hukum digunakan sebagai panduan komunikasi terkait pengelolaan sampah | 28 | Apakah data pemantauan dan penegakan pengelolaan sampah pemerintah daerah telah digunakan untuk menginformasikan perencanaan, dan peningkatan strategi komunikasi di masa depan? | Y: \_\_\_ N:\_\_\_   |  |